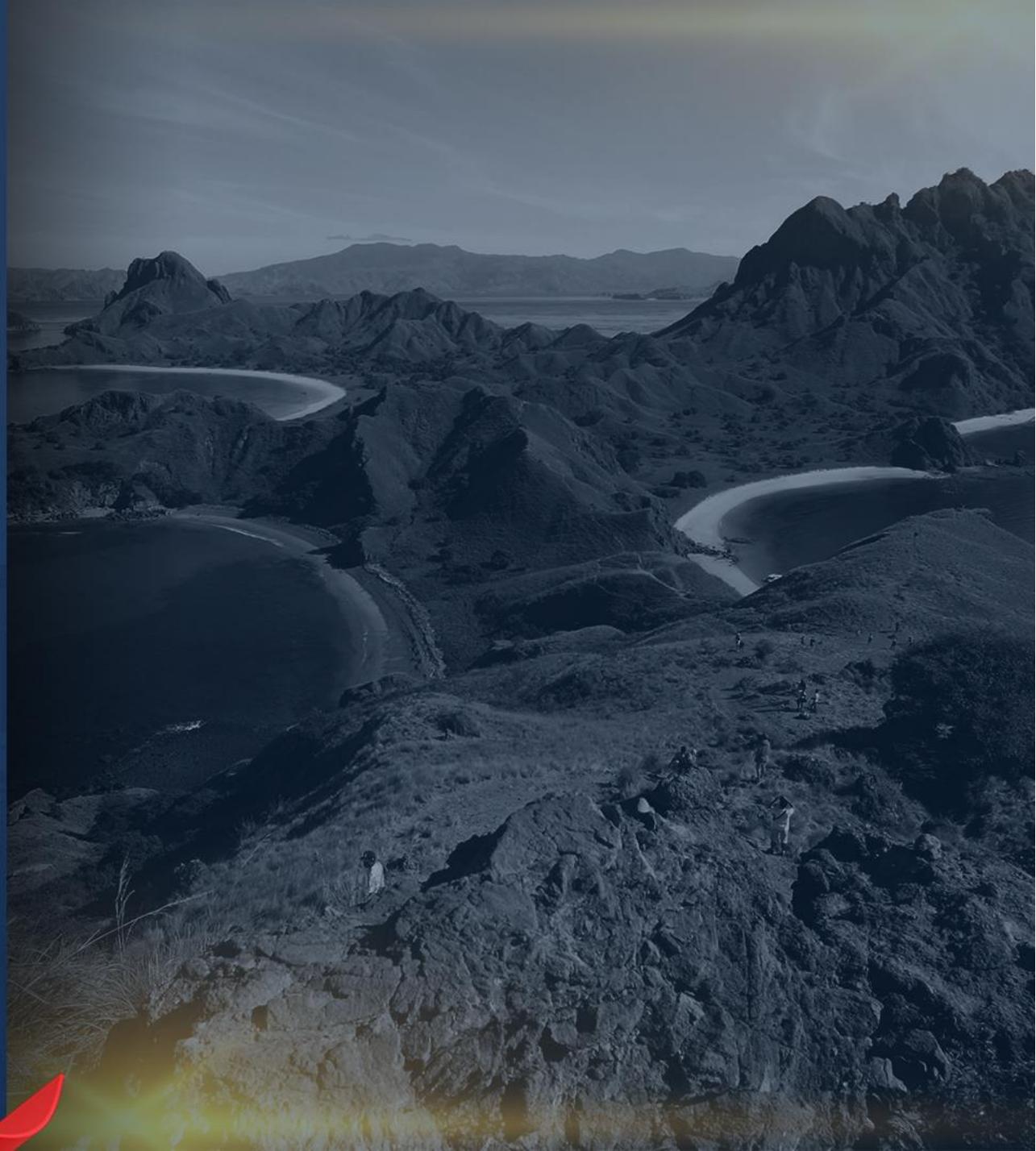




SOSIALISASI RANCANGAN AKHIR RPJPN 2025-2045

Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D
Deputi Bidang Ekonomi

Ketua Tim Penyusunan RPJPN 2025-2045



OUTLINE

01

Momentum Transformasi melalui Penyusunan Rencana Jangka Panjang

- Transformasi Sosial
- Transformasi Ekonomi
- Transformasi Tata Kelola
- Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- Landasan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Kerangka Implementasi: Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana
- 45 Indikator Utama Pembangunan

02

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah melalui Penyusunan SEB

03

Tindak Lanjut



From

Re-Form

Reform is to put into a new
and improved form or
condition

To

Trans-Form

Transform is to change
greatly the appearance or
form



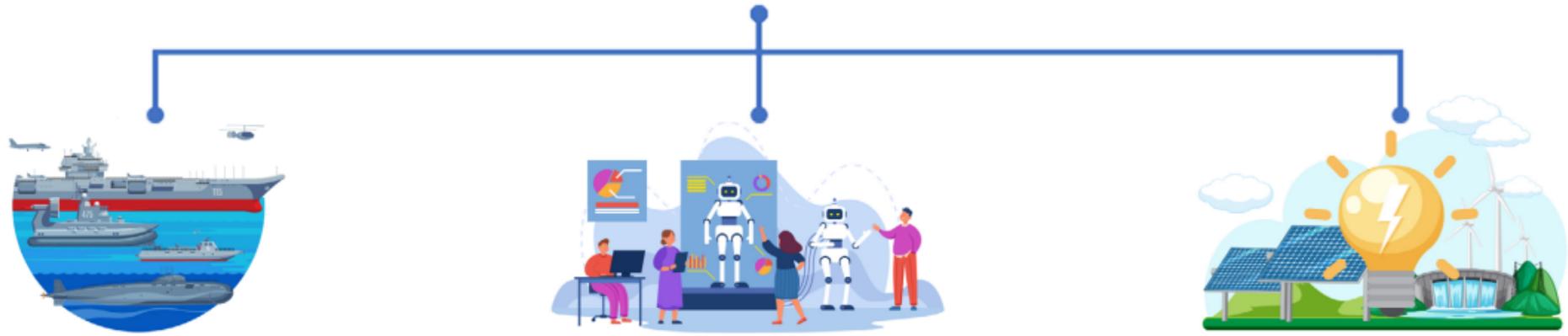
MOMENTUM TRANSFORMASI MELALUI PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG





Negara Nusantara

Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia



Berdaulat

Ketahanan, Kesatuan,
Mandiri, Aman

Maju

Berdaya, Modern, Tangguh,
Inovatif, Adil

Berkelanjutan

Lestari dan seimbang antara
pembangunan ekonomi, sosial, dan
lingkungan

STRATEGI BESAR: 8/17/45 BERLANDASKAN PANCASILA



5 SASARAN VISI INDONESIA EMAS 2045

01



Pendapatan per kapita setara negara maju

	2025 Baseline	2045 (Target)
GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

02



Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang

	2025 Baseline	2045 (Target)
Rasio Gini (indeks)	0,377-0,382	0,290-0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	20,6 (2022)	28,5

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

03



Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar

Sumber: Pareto economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

04



Daya saing sumber daya manusia meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Human Capital Index (indeks)	0,54 (2022)	0,73

Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

05



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

	2025 Baseline	2045 (Target)
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5

8 (MISI) AGENDA PEMBANGUNAN

Kerangka Pikir Transformasi untuk Menuju Indonesia Emas 2045

Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan





17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1. Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

20 UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS (GAME CHANGERS)

Transformasi Sosial

1. Percepatan **wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Peningkatan **partisipasi pendidikan tinggi** dan **lulusan STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
3. **Restrukturisasi kewenangan** pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan
4. **Investasi pelayanan kesehatan primer**, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta)
5. **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan **perlindungan sosial adaptif terintegrasi**

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

18. **Penguatan karakter dan jati diri bangsa**
19. **Reformasi pengelolaan sampah** terintegrasi dari hulu ke hilir
20. **Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan** dengan pendekatan terpadu *FEW Nexus* (*food, energy, water*)

Transformasi Ekonomi

6. Peningkatan **anggaran IPTEKIN** nasional menuju komersialisasi oleh Industri
7. **Industrialisasi**: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
9. **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
10. **Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan** pertumbuhan ekonomi
11. **Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)**



Transformasi Tata Kelola

12. **Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN** (terutama *single salary* dan sistem pensiun), serta **pemberantasan korupsi**
13. **Penguatan integritas partai politik**

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

14. **Transformasi Sistem Penuntutan** menuju *Single Prosecution System* dan **Transformasi lembaga Kejaksaan** sebagai *Advocaat Generaal*
15. **Transformasi Industri Pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
16. **Transformasi perencanaan dan fiskal**: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
17. **Reformasi subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran



TRANSFORMASI SOSIAL DALAM RPJPN 2025-2045



SASARAN TRANSFORMASI SOSIAL



Indonesia pada tahun
2045



Transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing

SEHAT



Sistem kesehatan yang tangguh dan responsif



Setiap penduduk berusia panjang dan hidup sehat:



Stunting di bawah 5%
tuberkulosis dan kusta tereliminasi



Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi 80 tahun

CERDAS DAN TERPELAJAR



Pendidikan berkualitas dan merata yang menghasilkan SDM unggul, berkarakter, dan berdaya saing



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 12 tahun



Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 14,81 tahun



Skor PISA meningkat

Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi sebesar 75%

TERLINDUNGI DAN SEJAHTERA



Melalui perlindungan sosial yang adaptif menuju kemiskinan 0%

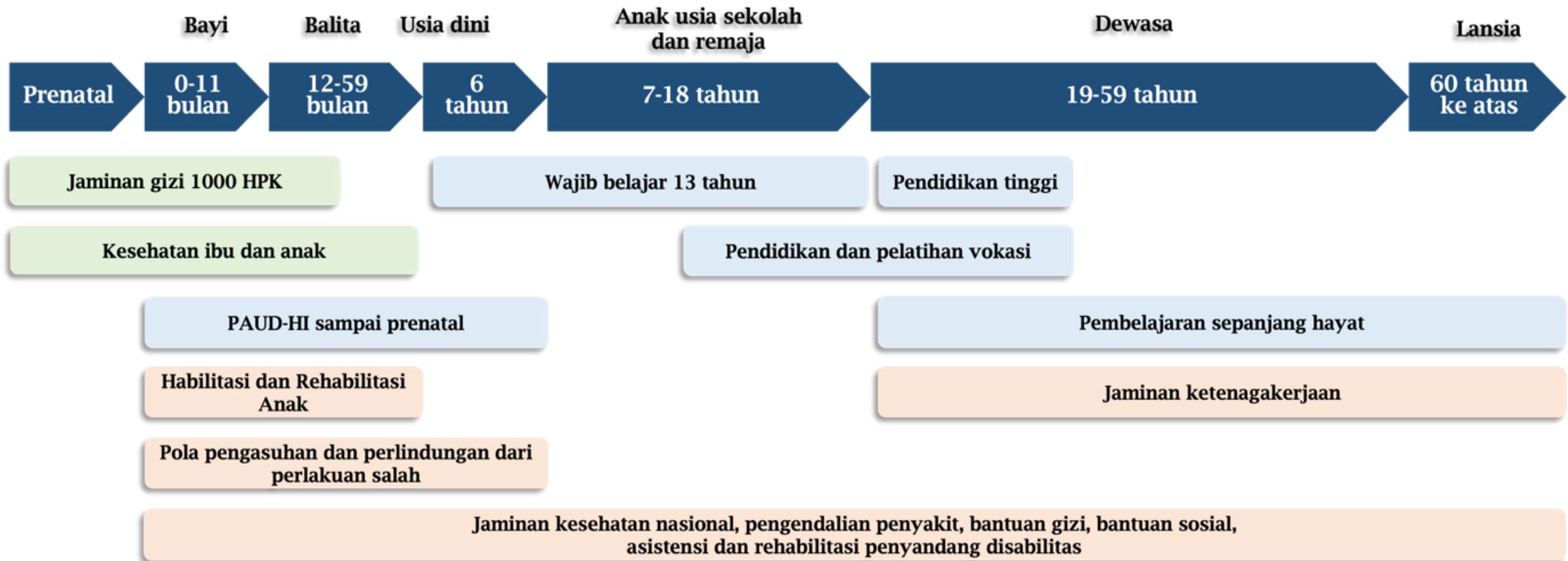


TAHAPAN TRANSFORMASI SOSIAL



PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN SIKLUS HIDUP

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

5 Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Sosial

ARAH (TUJUAN) TRANSFORMASI SOSIAL:

IE 1 Kesehatan untuk Semua

IE 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif



Transformasi Sosial

1. **Percepatan wajib belajar 13 tahun** (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. **Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas** termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
3. **Restrukturisasi kewenangan** pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. **Investasi pelayanan kesehatan primer**, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. **Penuntasan kemiskinan** dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.



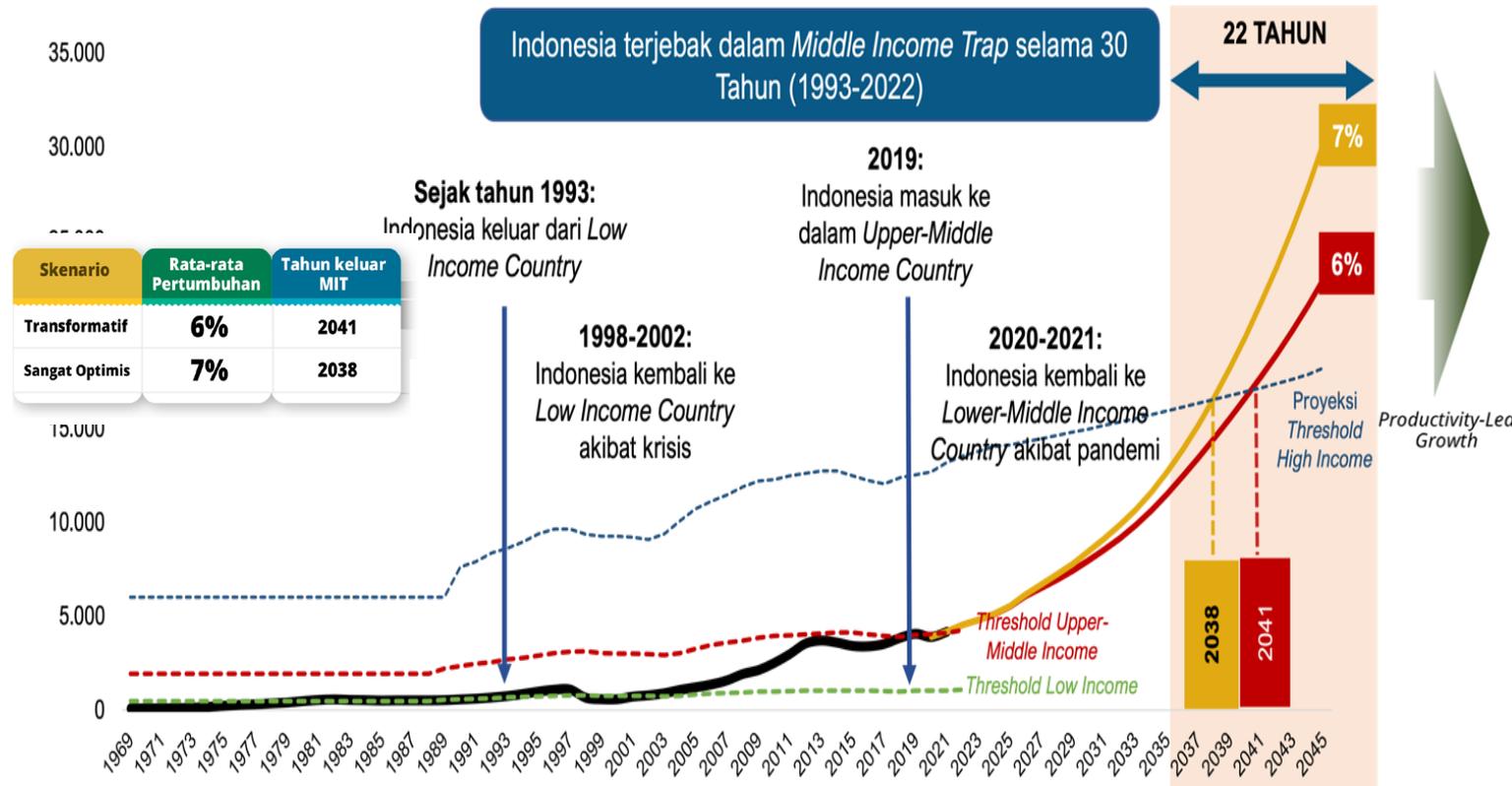
TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RPJPN 2025-2045



SASARAN TRANSFORMASI EKONOMI

Transformasi ekonomi ditujukan untuk Membawa Indonesia Keluar dari *Middle Income Trap*

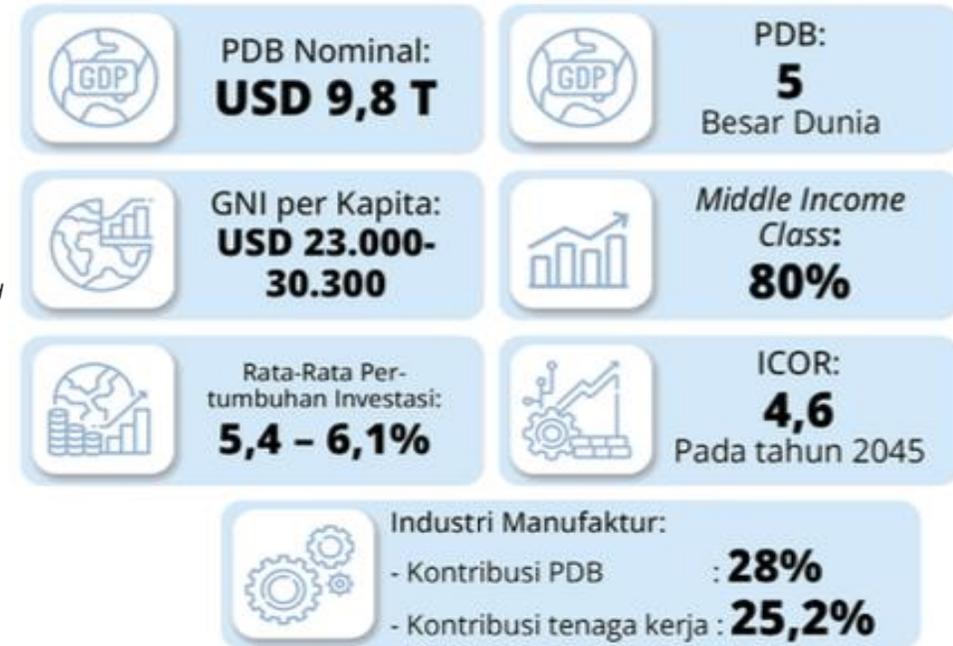
Trajektori GNI per Kapita Indonesia (US\$)



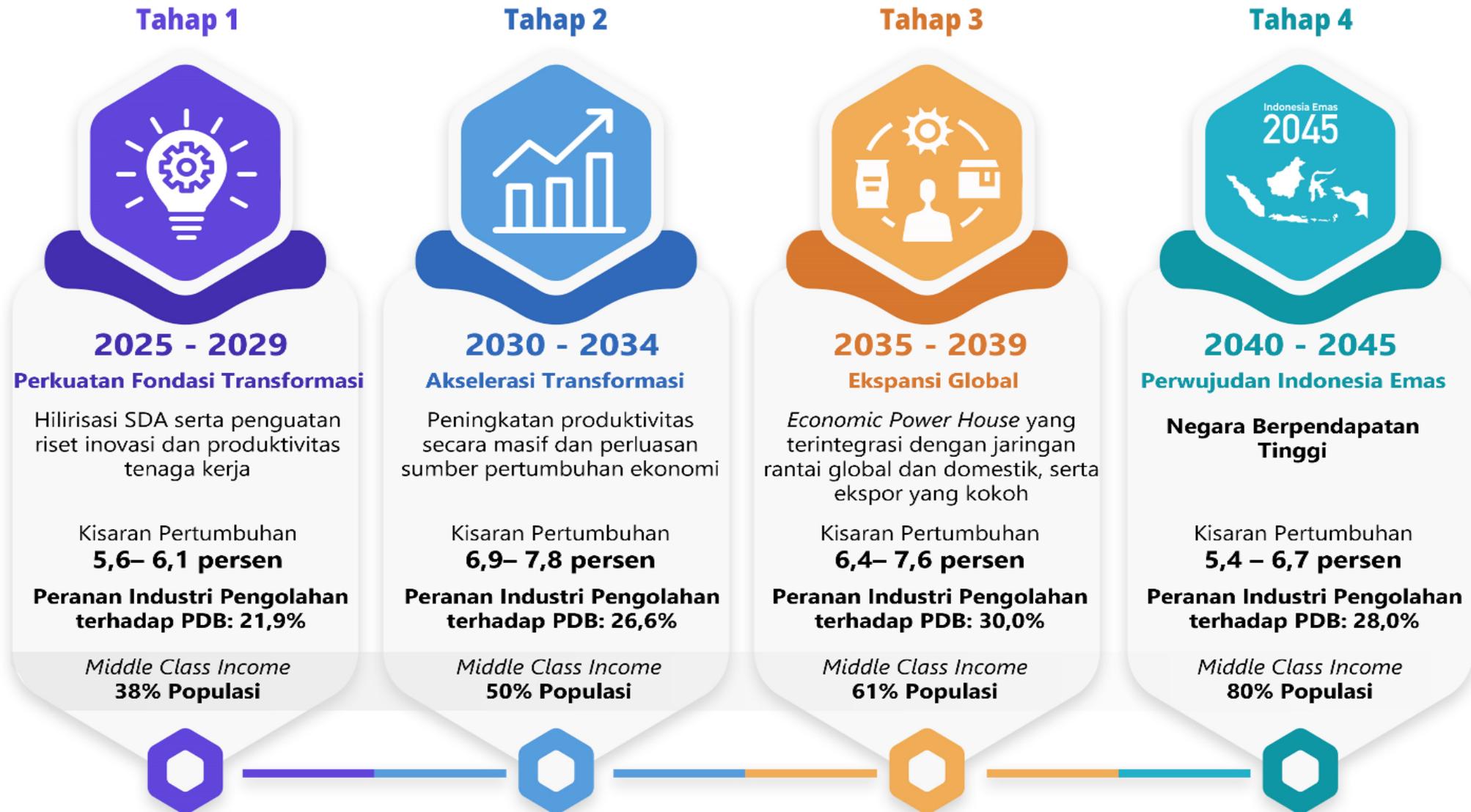
Indonesia pada tahun

2045

... dengan pertumbuhan rata-rata 7%...



TAHAPAN TRANSFORMASI EKONOMI



ARAH (TUJUAN) TRANSFORMASI EKONOMI

IE 4

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas
Ekonomi

IE 5

Penerapan Ekonomi Hijau

IE 6

Transformasi Digital

IE 7

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE 8

Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi



Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi
didorong melalui:

1. **Industrialisasi**
2. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
3. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian
4. Blue-Economy dan Bio Economy
5. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
6. Produktivitas BUMN
7. UMKM dan Koperasi
8. Produktivitas Tenaga Kerja

Pengembangan Iptek dan Inovasi:

- ✓ Pembentukan dana abadi riset dan teknologi
- ✓ Masyarakat berkarakter ilmiah (*scientific temper*)

6 Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi

1. Peningkatan **anggaran IPTEKIN** nasional menuju komersialisasi oleh Industri
2. **Industrialisasi**: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
3. **Percepatan transisi energi berkeadilan** menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
4. **Superplatform** untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
5. **Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan** pertumbuhan ekonomi
6. Pembangunan **Ibu Kota Nusantara (IKN)**





TRANSFORMASI TATA KELOLA DALAM RPJPN 2025-2045



Indonesia pada tahun
2045



Transformasi tata kelola ditujukan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

REGULASI BERKUALITAS DAN ADAPTIF

- Regulasi sederhana dan berkualitas
- Lembaga tunggal pengelola regulasi

KELEMBAGAAN DAN BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

- Kelembagaan dan proses bisnis yang efektif
- ASN Professional berintegritas
- Sistem penggajian tunggal dan pensiun yang menjamin kesejahteraan

PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, MUDAH, CEPAT, DAN TERJAMIN

- Pelayanan publik secara digital, terintegrasi, dan inklusif
- Sistem pengawasan dan pelayanan publik berkualitas

MASYARAKAT SIPIL MANDIRI DAN PARTISIPATIF

- Partisipasi masyarakat sipil yang bermakna terhadap pembangunan
- Partai politik yang berintegritas

TAHAPAN TRANSFORMASI TATA KELOLA

Tahap 1



2025 - 2029
Penguatan Pondasi

Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

Tahap 2



2030 - 2034
Akselerasi Transformasi

Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas, dan masyarakat sipil partisipatif

Tahap 3



2035 - 2039
Ekspansi Global

Kelembagaan adaptif, SDM ASN Kompetitif, Partai Politik Modern, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri

Tahap 4



2040 - 2045
Mewujudkan Indonesia Emas

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif



ARAH (TUJUAN) TRANSFORMASI TATA KELOLA

IE 9

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif



2 Upaya Super Prioritas untuk Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola

1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi
2. Penguatan integritas partai politik





LANDASAN TRANSFORMASI SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM RPJPN 2025-2045



TAHAPAN PEMBANGUNAN SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

Tahap 1



2025 - 2029

Penguatan Pondasi

Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan

Tahap 2



2030 - 2034

Akselerasi Transformasi

Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, serta Kekuatan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi Transformasi dan Pembangunan

Tahap 3



2035 - 2039

Ekspansi Global

Indonesia yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin di kawasan

Tahap 4



2040 - 2045

Mewujudkan Indonesia Emas

Indonesia yang berdaulat, aman dan damai serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan dunia

ARAH (TUJUAN) SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA:

IE 10

Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

IE 11

Stabilitas Ekonomi Makro

IE 12

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

1. **Transformasi sistem penuntutan** menuju *single prosecution system* dan **transformasi lembaga kejaksaan** sebagai *advocaat general*
2. **Transformasi industri pertahanan** menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional
3. **Transformasi perencanaan dan fiskal:** perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
4. **Reformasi subsidi** terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran





LANDASAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI DALAM RPJPN 2025-2045

TAHAPAN PEMBANGUNAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

Tahap 1



2025 - 2029
Penguatan Pondasi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Tahap 2



2030 - 2034
Akselerasi Transformasi

Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif

Tahap 3



2035 - 2039
Ekspansi Global

Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan

Tahap 4



2040 - 2045
Mewujudkan Indonesia Emas

Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan

ARAH (TUJUAN) KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

IE 13

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE 14

Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

IE 15

Lingkungan Hidup Berkualitas

IE 16

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

IE 17

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3 Upaya Super Prioritas untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
3. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (*food, energy, water*)





KERANGKA IMPLEMENTASI: PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA



Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Indeks Williamson	0,778	0,750
Kontribusi KTI terhadap PDB (persen)*	20,6	28,5
Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Keterangan:

* KTI mencakup wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua

TRAJEKTORI PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KAWASAN DAN WILAYAH 2025-2045

KAWASAN BARAT INDONESIA

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	5,1	5,4 – 5,8	6,8 – 7,5	6,1 – 7,0	5,1 – 6,0
Kontribusi*	78,5	76,7	74,7	72,9	71,5

KAWASAN TIMUR INDONESIA

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	6,1	6,8 – 7,4	8,7 – 9,9	8,0 – 9,5	6,2 – 7,7
Kontribusi*	21,5	23,3	25,3	27,1	28,5

SUMATERA

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	4,7	5,0 – 5,4	6,7 – 7,7	6,0 – 7,1	5,2 – 6,4
Kontribusi*	22,0	22,2	22,9	23,0	23,2

KALIMANTAN

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	4,9	5,6 – 6,3	8,5 – 9,9	7,3 – 8,9	5,7 – 7,3
Kontribusi*	9,2	9,6	10,5	11,1	11,3

MALUKU

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	14,2	11,6 – 12,4	12,5 – 13,9	10,8 – 12,7	7,3 – 9,3
Kontribusi*	0,7	1,0	1,4	1,8	2,0

SULAWESI

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	7,1	7,6 – 8,4	9,0 – 10,5	8,6 – 10,3	6,4 – 8,1
Kontribusi*	7,0	7,6	7,8	8,1	8,1

PAPUA

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	7,0	6,8 – 7,2	7,8 – 8,4	7,4 – 8,2	6,0 – 6,9
Kontribusi*	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0

JAWA

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	5,3	5,6 – 5,9	6,8 – 7,5	6,2 – 7,0	5,0 – 5,9
Kontribusi*	56,5	54,5	51,8	49,9	48,3

BALI-NUSA TENGGARA

	2022	2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Pertumbuhan	5,1	6,8 – 7,0	8,0 – 8,3	7,4 – 8,0	6,6 – 7,3
Kontribusi*	2,7	3,0	3,2	3,4	4,1

Keterangan:
Kawasan Barat Indonesia (KBI): mencakup Sumatera, Jawa,
Kawasan Timur Indonesia (KTI): mencakup Kalimantan, Bali-Nusra, dan Sulampua
*Kontribusi di akhir periode menggunakan skenario 7%

Sumber: Exercise Bappenas (2023) per 22 Juni 2023

KERANGKA IMPLEMENTASI: PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA

Tematik Pembangunan Wilayah





Transformasi Sosial

- Pembangunan manusia unggul yang sehat, cerdas, dan terpelajar, serta terlindungi dan sejahtera
- Pemenuhan dan peningkatan akses kualitas layanan dasar
- Penguatan perlindungan sosial adaptif
- Pengembangan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi



Transformasi Tata Kelola

- Pengelolaan sektor publik yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta penguatan penindakan korupsi menuju *zero corruption*
- Penyederhaan regulasi
- Penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna dengan penerapan tata kelola partai politik yang akuntabel dan kaderisasi yang efektif



Transformasi Ekonomi

- Pengembangan koridor ekonomi berbasis keunggulan wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama di luar Pulau Jawa
- Pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, bioekonomi untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- Penerapan transisi energi dan transformasi digital
- Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, sekaligus IKN sebagai *superhub* ekonomi dan kota berkelanjutan

Kewilayahan dan Sarana Prasarana



- Penyelesaian isu penataan tata ruang dan pelaksanaan reforma agraria
- Pengelolaan urbanisasi dan perkotaan
- Pembangunan pusat pertumbuhan
- Pembangunan dan pemberdayaan perdesaan dan daerah afirmasi
- Pembangunan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sarana dan prasarana terbangun untuk mendukung transformasi ekonomi, seperti jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan, integrasi antarmoda, integrasi infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT, transformasi digital, ketahanan sumber daya air, pembangunan perumahan berikut sarana dan prasarana pendukungnya
- Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial, seperti penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan dan perumahan, pemenuhan konektivitas fisik dan digital, pemerataan pelayanan tenaga listrik, serta perkuatan sarana dan prasarana berketahanan bencana
- Penataan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk desentralisasi administrasi dan keuangan daerah (intensifikasi pajak daerah, kualitas belanja daerah, serta pendanaan dan investasi non-pemerintah)



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



ASEAN
INDONESIA
2023

ISU STRATEGIS PER WILAYAH CONTOH WILAYAH: KALIMANTAN

	Pembiayaan	SDM: Ketenagakerjaan	SDM: Pendidikan	SDM: Kesehatan	Infrastruktur	Regulasi dan Institusi	Makro dan Fiskal	Daya Saing
Kalimantan Barat	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalimantan Tengah	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalimantan Selatan	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalimantan Timur	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalimantan Utara	●	●	●	●	●	●	●	●

- Faktor Penghambat Utama
- Faktor Penghambat
- Bukan Faktor Penghambat

Isu Spesifik per Provinsi



KALIMANTAN UTARA

- Indeks Pembangunan Manusia APM khususnya rata-rata lama sekolah perlu ditingkatkan
- Kualitas jalan nasional dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan
- Akses listrik, sanitasi layak, dan air minum belum merata
- Akses internet dan telepon genggam perlu diperluas



KALIMANTAN BARAT

- IPM perlu ditingkatkan terutama indikator Rata-rata Lama Sekolah
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP/SMA perlu ditingkatkan
- Rasio jalan dengan kondisi baik masih rendah
- Akses infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung perlu ditingkatkan



KALIMANTAN TIMUR

- Kualitas jalan nasional dan provinsi masih perlu ditingkatkan
- Persentase masyarakat dengan akses air bersih relatif rendah
- Daya saing daerah masih dapat ditingkatkan (Indeks Daya Saing maupun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan)



KALIMANTAN TENGAH

- Kualitas jalan nasional dan kab/kota perlu diperbaiki
- Akses listrik, sanitasi layak dan air bersih perlu ditingkatkan
- Tingkat inflasi perlu dijaga
- Tingkat kemandirian fiskal perlu ditingkatkan



KALIMANTAN SELATAN

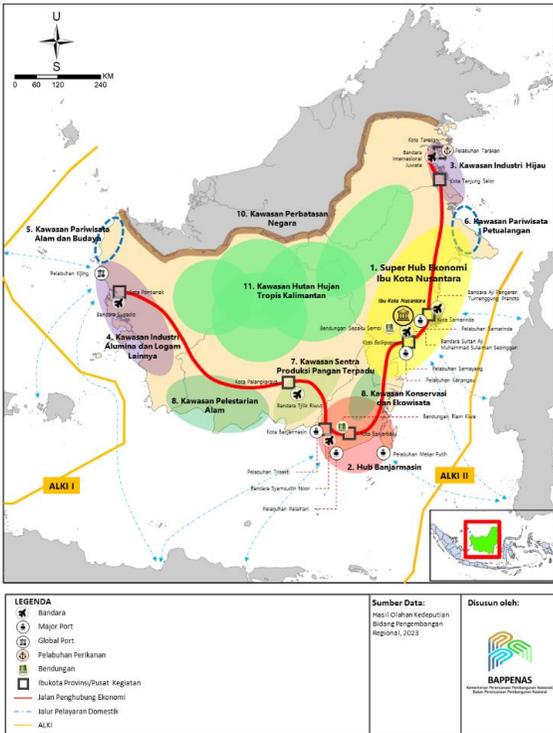
- Indeks Pembangunan Manusia khususnya rata-rata lama sekolah perlu ditingkatkan
- APM SMP dan SMA masih perlu ditingkatkan



- Secara umum, kendala penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kalimantan adalah aspek SDM dilihat dari segi pendidikan, aspek infrastruktur, serta aspek stabilitas makro fiskal.
- Untuk infrastruktur, kendala utama yang dihadapi adalah kemantapan jalan, serta aksesibilitas infrastruktur dasar dan digital.

BEBERAPA ARAH KEBIJAKAN SPESIFIK WILAYAH KALIMANTAN

Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan



Wilayah Kalimantan diarahkan menjadi
“Superhub Ekonomi Nusantara”



Arah Kebijakan

- **Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra sebagai *superhub* ekonomi** yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
 - **Pengembangan sektor ekonomi baru berbasis inovasi** seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan serta pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan seperti biokimia pangan, herbal, dan nutrisi.
 - **Pengembangan kawasan sentra produksi pangan** terpadu, modern, dan berkelanjutan.
 - **Pengembangan destinasi wisata potensial** seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam.
- **Pengembangan pusat-pusat industri** di berbagai Wilayah Kalimantan melalui:
 - **Hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan** (kelapa sawit, batubara, migas, dan hasil hutan), **dan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan** seperti industri *oleochemicals*, *petrochemicals*, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik, dan bioteknologi.
- **Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama** di Kalimantan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep *Economic Hub* tiga kota di Kalimantan Timur (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang, Samarinda, serta Kijing.
- **Pemanfaatan ALKI I** di sisi Wilayah Kalimantan bagian barat **dan ALKI II** di sisi Wilayah Kalimantan bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
- **Pengembangan bandara** utama dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk *aerocity*) serta pengembangan bandara perairan dan *seaplane*
- **Pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan Trans Kalimantan** terutama pada koridor perbatasan antar negara, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah.
- **Pengembangan angkutan sungai** untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
- **Pengembangan moda kereta api** untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota selaras pertumbuhan permintaan dan perkembangan wilayah.
- **Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri** terutama melalui pemanfaatan energi hidro seperti Sungai Kayan.
- **Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi** melalui upaya memperluas jaringan ke seluruh pelosok, utamanya di Kawasan Ibu Kota Nusantara, serta Kawasan industri dan pertambangan.



ISU STRATEGIS PER WILAYAH

CONTOH WILAYAH: PAPUA

	Pembiayaan	SDM: Ketenagakerjaan	SDM: Pendidikan	SDM: Kesehatan	Infrastruktur	Regulasi dan Institusi	Makro dan Fiskal	Daya Saing
Papua Barat	●	●	●	●	●	●	●	●
Papua	●	●	●	●	●	●	●	●

- Faktor Penghambat Utama
- Faktor Penghambat
- Bukan Faktor Penghambat



- Secara umum, faktor penghambat pembangunan ekonomi di Wilayah Papua yang utama adalah **SDM pendidikan, infrastruktur, serta makro dan fiskal**
- Untuk **Provinsi Papua Barat**, faktor penghambat lainnya adalah **regulasi dan institusi**.
- Sedangkan di **Provinsi Papua**, faktor penghambat lainnya adalah **SDM kesehatan**.

Isu Spesifik per Provinsi



PAPUA BARAT
<ul style="list-style-type: none"> • IPM masih relatif rendah, butuh peningkatan khususnya pada aspek rata-rata lama sekolah • APM pendidikan dasar dan menengah masih relatif rendah • Kualitas jalan masih perlu ditingkatkan • Akses listrik, sanitasi layak dan air bersih perlu ditingkatkan • Kepemilikan telepon genggam masih rendah



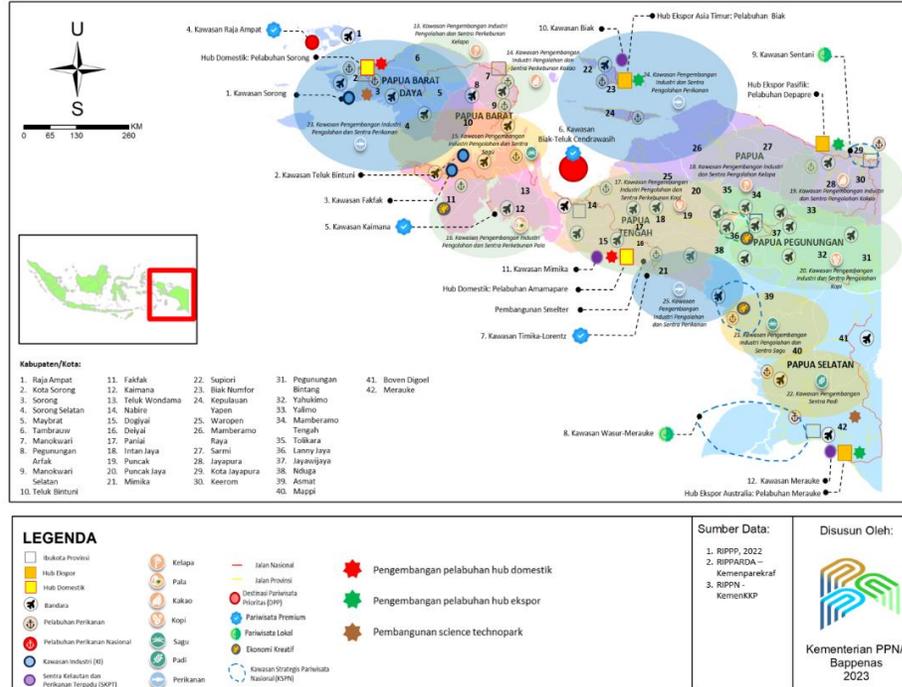
PAPUA
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rata-rata lama perlu menjadi perhatian • Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan perlu diperhatikan • Kualitas jalan mantap perlu ditingkatkan • Akses listrik, sanitasi, air bersih, internet perlu ditingkatkan • Aksesibilitas telepon genggam dan internet perlu diperluas



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BEBERAPA ARAH KEBIJAKAN SPESIFIK WILAYAH PAPUA

Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Papua



Arah Kebijakan

- **Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar secara merata** melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan OAP, penguatan *telemedicine* dan *mobile health services* (pelayanan kesehatan bergerak), dan pengembangan sekolah alam dan sekolah berpola asrama.
- **Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian dan perikanan** termasuk hilirisasi industri berbasis migas, mineral, dan kimia dasar melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting.
- **Penguatan sentra-sentra produksi** di kawasan pedesaan, sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta pembangunan ekosistem kepariwisataan yang mendukung pariwisata berkelanjutan.
- **Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua** melalui pengembangan pelabuhan simpul utama sebagai *transshipment hub* domestik wilayah timur; pengembangan konektivitas *feeder* angkutan laut; serta pengembangan bandara utama, *airstrip*, bandara perairan, dan *seaplane*.
- **Penyelesaian jalan Trans Papua, pembangunan dan peningkatan jalan** termasuk jalan daerah, dan **pengembangan transportasi perkotaan** termasuk sistem angkutan umum masal di kota besar seperti Jayapura dan Sorong.
- **Pengembangan sistem smart grid** ketenagalistrikan termasuk interkoneksi jaringan tenaga listrik serta pengembangan **sistem terisolasi (isolated grid)**.
- **Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)**, peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital, literasi digital bagi masyarakat, serta meningkatkan kemampuan SDM digital terutama bagi OAP.
- **Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus** berbasis kinerja yang lebih akuntabel dan transparan, penguatan kapasitas dan kelembagaan GWPP terutama di Daerah Otonom Baru, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama OAP hingga ke tingkat kampung.
- **Peningkatan keamanan** dan ketertiban masyarakat; pertahanan dan keamanan perbatasan negara; serta fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang pembangunan kawasan pusat pertumbuhan.
- **Pengembangan sentra produksi pangan/food estate** sagu dan padi dengan modernisasi teknologi pertanian.
- **Penguatan regulasi** terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat.

Wilayah Papua diarahkan menjadi **"Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif"** dengan koridor ekonomi **"Industri Kimia Dasar dan Agro"**



45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN



INDIKATOR CAPAIAN TRANSFORMASI SOSIAL

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80,0
	2. Kesehatan ibu dan anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76
Pendidikan Berkualitas yang Merata	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5
	5. Hasil Pembelajaran		
	a) Rata-rata nilai PISA		
	a-i Membaca	396	485
	a-ii Matematika	404	490
	a-iii Sains	416	487
	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,0
c) Harapan Lama Sekolah	13,37	14,81	
Perlindungan Sosial yang Adaptif	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75,00
	8. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	0,5 – 0,8
Perlindungan Sosial yang Adaptif	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,0	60,0

INDIKATOR CAPAIAN TRANSFORMASI EKONOMI (1/2)

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0
	12. Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100
	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0
	b) Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Agustus 2022)	8,0
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0
	d) Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,0
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70,0
	17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar



Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70
Transformasi Digital	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51	20 besar
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	16,9 (2019)	9,0
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,8	27,2
	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26,0	40,0
Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92
	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100



INDIKATOR CAPAIAN TRANSFORMASI TATA KELOLA

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,25	0,49
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5,00
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,87	5,00
	27. Anti Korupsi		
	a) Indeks Integritas Nasional	71,94 (2022)	96,98
	b) Indeks Persepsi Korupsi	34	60

INDIKATOR CAPAIAN SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum	0,60 (2021)	0,84
	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80,0
	30. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)
Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0
	32. Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200
	b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60
	c) Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20
d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120	
e) Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90	
	34. Inklusi Keuangan (%)	91	98
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)	60,4 (2023)	75,0-80,0
	36. Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	14,6 (2023)	45,0



INDIKATOR CAPAIAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025*	Sasaran 2045
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15
	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,20
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00
	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,15
Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,75
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2022)	76,12
	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	i. Ketahanan Energi		
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24
	ii. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6,2	2,1
	iii. Ketahanan Air		
- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	63,45	200	
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian (%)	39,0	100	
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11
	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a. Kumulatif	28,12	51,51
b. Tahunan	32,65	80,98	

*Merupakan proyeksi target tahun 2025



SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH MELALUI PENYUSUNAN SEB



Saat ini RUU RPJPN Tahun 2025-2045 belum diundangkan, sedangkan terdapat urgensi bagi daerah untuk **segera menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 mengingat pendaftaran calon kepala Daerah akan dimulai pada bulan Februari 2024**. Visi, misi dan program calon kepala/wakil kepala daerah wajib berpedoman pada RPJPD, dan RPJPD wajib berpedoman pada RPJPN.

Untuk mempercepat proses penyusunan, diperlukan SEB antara Menteri PPN dan Mendagri untuk memastikan:

- a. Daerah Provinsi mulai segera menyusun RPJPD dengan **periode yang sama** dengan RPJPN yaitu untuk tahun 2025-2045.
- b. **RPJPD yang disusun oleh daerah Provinsi berpedoman pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045**, terutama untuk penyelarasan: 1) Visi, 5 Sasaran Visi, 8 Misi Pembangunan, dan 17 Arah Pembangunan; 2) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana; dan 3) 45 Indikator Utama Pembangunan.
- c. **Keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam proses penyusunan RPJPD** oleh daerah untuk memastikan keselarasan substansi RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.



Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025-2045 mengamanatkan agar
“RPJP Daerah wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional tahun 2025-2045”

Pasal 10 Ayat (2)

Bagian Kedua

Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2)

Pasal 10

Ayat (1)

Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045” adalah selaras dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sebagaimana tertuang dalam Bab V RPJP Nasional Tahun 2025-2045 mengenai Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bab V RPJP Nasional Tahun 2025-2045 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah

Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

1. Tata Ruang dan Pertanahan
2. Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan
3. Pusat Pertumbuhan
4. Perdesaan dan Daerah Afirmasi
5. Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial
6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Arah Kebijakan Wilayah

Arah Kebijakan Transformasi

- A. Transformasi Sosial
- B. Transformasi Ekonomi
- C. Transformasi Tata Kelola

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

- A. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
- B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

- A. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana
- B. Kesenambungan Pembangunan



URGENSI PENYUSUNAN SEB: MEMASTIKAN RPJPD SELARAS DAN BERPEDOMAN PADA RPJPN 2025-2045

AMANAT RUU RPJPN 2025-2045:

Penyusunan RPJP Daerah Wajib Selaras dan Berpedoman pada RPJPN 2025-2045 (Pasal 10 ayat (2))

ISU STRATEGIS DAERAH
Evaluasi Dua Dekade Pembangunan Modal Dasar Daerah (Kependudukan, Sosial Budaya, Kekayaan Alam)
Isu Global
Isu Nasional
Isu Daerah



UPAYA TRANSFORMATIF
Tahapan Pembangunan & Skala Prioritas
Kaidah Pelaksanaan
Penelaahan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

RPJP Daerah 2025-2045

VISI DAERAH

5 Sasaran Visi Daerah

MISI DAERAH

ARAH KEBIJAKAN

SASARAN POKOK

RPJP Nasional 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045

8 Misi Pembangunan RPJPN 2025-2045

Bab V RPJP Nasional Tahun 2025-2045
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

45 Indikator Utama Pembangunan



Batang Tubuh

- Permintaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk **segera menyusun RPJPD provinsi** yang selaras dan berpedoman pada Rankhir RPJPN 2025-2045;
- Periode RPJPD provinsi mengikuti **periode** Rankhir RPJPN Tahun 2025-2045;
- **Keselarasan muatan RPJPD provinsi** dengan visi, 5 sasaran visi, 8 misi Pembangunan, 17 arah Pembangunan, arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana serta 45 indikator utama Pembangunan;
- Penyusunan RPJPD provinsi dilakukan dengan **fasilitasi, koordinasi dan asistensi dari Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas**;
- Penjabaran peran Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas secara garis besar;
- **RPJPD provinsi menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala dan wakil kepala daerah** dalam menyusun visi, misi dan program saat pendaftaran Pilkada serentak tahun 2024. (sehingga harus selesai sebelum masa pendaftaran);
- **Penyusunan RPJPD kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur.**

Lampiran

Lampiran I

Pedoman Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan Prosedur Penyusunan RPJPD.

Lampiran II

Tabel Penyelarasan 5 Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Lampiran III

Pedoman Umum Penyusunan RPJPD.

Catatan: *Lampiran akan disusun dan disepakati bersama oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri.*

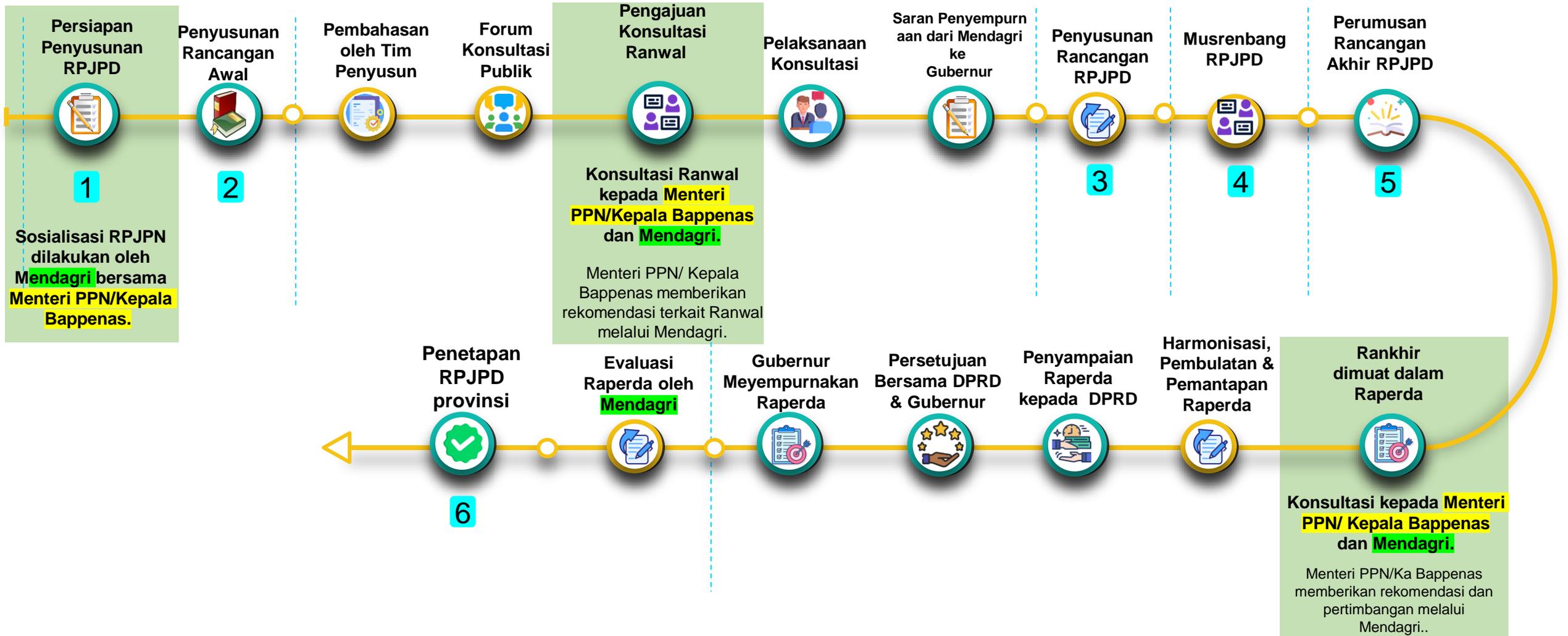


BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



GAMBARAN UMUM SEB MENTERI PPN/BAPPENAS DAN MENTERI DALAM NEGERI: KETERLIBATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Untuk memastikan keselarasan substansi RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas terlibat dalam beberapa proses penyusunan RPJPD oleh Daerah





TINDAK LANJUT



1. RPJP Nasional **menjadi acuan** dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat **visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah** dengan *fokus pada* **TRANSFORMASI DAERAH sesuai dengan karakteristik wilayahnya**
2. **Perencanaan daerah (RPJPD) harus selaras** dengan **perencanaan nasional (RPJPN)** sehingga visi misi nasional dapat tercapai

Transformasi Indonesia

- Transformasi Sosial • Transformasi Ekonomi • Transformasi Tata Kelola

Landasan Transformasi

- Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kerangka Implementasi Transformasi

- Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas
- Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Kesyukuran Pembangunan

Paling sedikit **substansi RPJPD yang selaras dengan RPJPN** adalah:

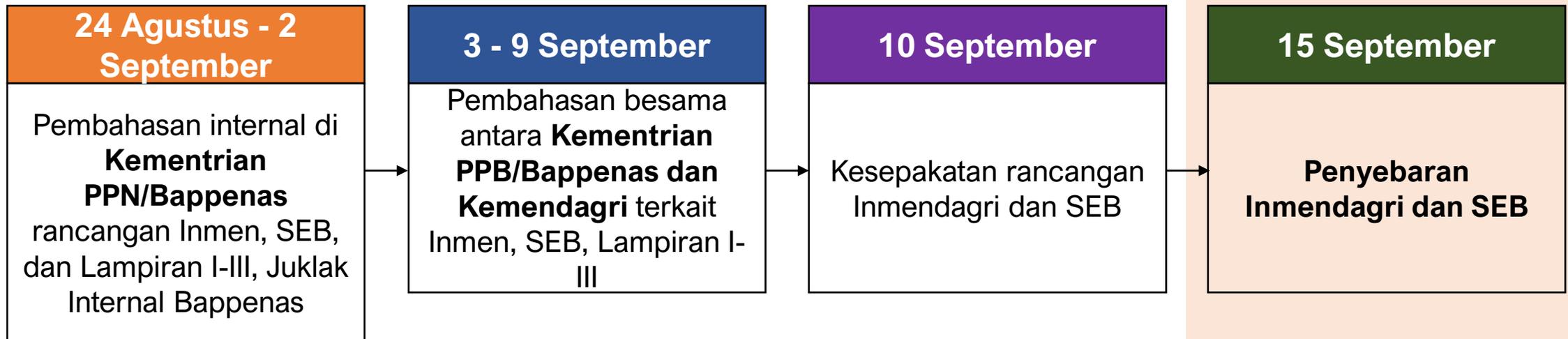
- **Visi**
- **Misi**
- **Agenda Pembangunan**
- **45 Indikator Utama Pembangunan**

PERLUNYA PENYELESAIAN SEGERA SEB MENTERI PPN DAN MENTERI DAGRI

1. **SEB telah disepakati** oleh Menteri Dalam Negeri **untuk diterbitkan segera.**
2. **Pedoman Umum disepakati untuk tidak diterbitkan secara terpisah**, namun akan menjadi lampiran SEB.
3. **Instruksi Menteri (Inmen)** disarankan hanya berisi instruksi dari Mendagri kepada **Pemerintah Daerah Provinsi untuk segera menyusun rancangan RPJPD Provinsi berdasarkan SEB beserta lampirannya.**



TIMELINE PENYUSUNAN SEB DAN INMENDAGRI ANTARA BAPPENAS DAN KEMENDAGRI





TERIMA KASIH





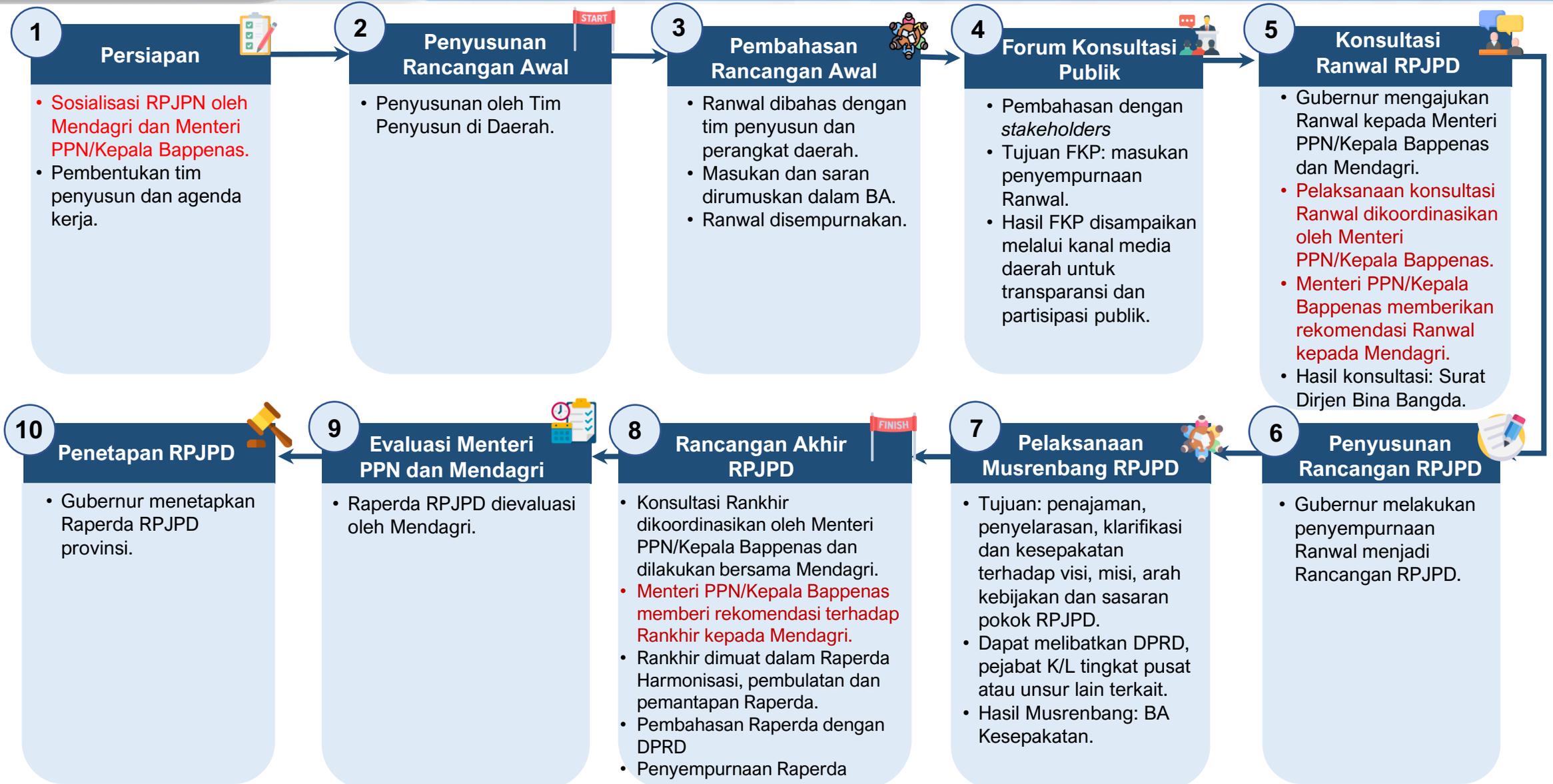
DISKUSI KESEPAKATAN



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045





Usulan Muatan Substansi

1. **Keselarasn Visi dan 5 Sasaran Visi**
2. **BAB V** Kewilayahan dan Sarana Prasarana
3. **45 Indikator Utama Pembangunan**
4. **Kaidah Pelaksanaan**

Usulan Proses

1. **Fasilitasi, Konsultasi, dan Asistensi**
 - Perlu disepakati bentuk dan frekuensi dari konsultasi tersebut
 - Usulan bentuk konsultasi *one-on-one* tim penyusun RPJPD dan RPJPN (bukan dalam bentuk forum besar seperti Musrenbang)
3. **Persetujuan Akhir (*Approval*)**